MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN DXVI
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	7	
1.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | RSUD DR. H. JUSUF SK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		58	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PARIWISATA
2.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
6.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO UMUM
7.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIOLOGI ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
8.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 PSIKOLOGI	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
11.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | INSPEKTORAT | INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
12.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
13.	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
14.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; D-IV RELASI INDUSTRI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS SOSIAL | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
16.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 AGROBISNIS PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, PENGUATAN DAYA SAING PRODUK DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN
17.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
18.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
19.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | SUBBAGIAN TATA USAHA
21.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
22.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ORGANISASI
25.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT
27.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT
28.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
29.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
30.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | INSPEKTORAT | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
31.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN
33.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN PENGHUBUNG | SUBBAGIAN TATA USAHA
34.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
35.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN REKAYASA	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
36.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PLANOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ;	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA		| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 EKONOMI ; S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-2 PERENCANAAN WILAYAH ; S-2 KEBIJAKAN PUBLIK	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
38.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
39.	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV MEKANISASI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
40.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
41.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | INSPEKTORAT | INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
42.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
43.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 BIOLOGI ; S-1 AGRONOMI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
44.	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN HUTAN ; S-1 KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS KEHUTANAN
45.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM
46.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
47.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
48.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BADAN PENDAPATAN DAERAH
49.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA